

	News Title : Bursa Kripto Butuh Sinergi	
	Media Name : Bisnis Indonesia	Journalist : Lorenzo Anugrah Mahardhika, Mutiara Nabila
	Publish Date : 09 February 2022	Tonality : Neutral
	News Page : 10	News Value : 420,750,000
	Resources : Nailul Huda (Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef)), Teguh K Harmanda (Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo)), Ibrahim Assuaibi (Direktur PT TRFX Garuda Berjangka)	Ads Value : 140,250,000
	Section/Rubrication : Portofolio	Topic : Bursa Kripto



| INVESTASI ASET DIGITAL |

BURSA KRIPTO BUTUH SINERGI

Bisnis, JAKARTA — Sinergi antarregulator di bidang kripto dan jasa keuangan perlu diselenggarakan agar bursa khusus kripto tidak terkatung-katung akibat belum adanya kata sepakat terkait dengan peran bank kustodian untuk perdagangan aset kripto.

Mutiara Nabila & Lorenzo Anugrah Mahardhika
redaksi@bisnis.com

Langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pelarangan pihak perbankan memfasilitasi transaksi kripto pun menuai kritik dari sejumlah pihak.

OJK telah meminta kepada industri perbankan agar penggunaan rekening bank tidak dijadikan sebagai penampung dana dari kegiatan melanggar hukum, termasuk kripto. Hal itu merupakan tidak lanjut maraknya penipuan investasi dan kejahatan bermodus skema Ponzi.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai pernyataan OJK itu menandakan adanya ketidakselarasan antarinstansi pemerintah. Alasannya, kripto telah dirancang sebagai komoditas oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kementerian Perdagangan.

Tidak hanya itu, Bappebti juga telah merancang aturan terkait perdagangan dan pedagang kripto secara resmi. Artinya, selama transaksi dilakukan oleh pedagang kripto terdaftar dan diawasi Bappebti, skema perdagangan kripto layaknya komoditas ataupun produk derivatif lainnya.

"Di satu sisi Bappebti berupaya memfasilitasi industri ini, tapi di sisi lain ada institusi lain yang punya pandangan lain. OJK dan Bappebti ini sebaiknya ngobrol dulu, tren aset kripto ini kan sudah jalan

beberapa tahun terakhir," ungkap Nailul dikutip dari keterangan resminya, Selasa (8/2).

Di lain sisi, dia memahami sudut pandang OJK yang masih mempersepsikan bahwa aset kripto berpotensi sebagai alat tukar layaknya uang fiat, karena namanya adalah *cryptocurrency*. Sedangkan alat tukar resmi adalah rupiah sebagaimana diatur perundang-undangan.

"Tapi kan sejak awal ketika Bappebti memfasilitasinya, kesepakatan di Indonesia hanya boleh digunakan sebagai aset investasi. Bukan alat transaksi," jelas Nailul.

Oleh karena itu, dia menilai ada kegagalan dengan imbauan dari otoritas agar perbankan tidak memfasilitasi transaksi aset kripto, padahal sejak awal Bappebti merumuskan kripto sebagai komoditas investasi.

"Bagaimana bisa investor membeli atau berinvestasi aset kripto kalau tidak bisa menggunakan rekening bank sebagai jembatan untuk beli atau jual aset kripto ke pedagang kriptonya? Kan ini aset digital, masa iya beli dan jualnya lewat pedagang langsung secara *offline*," kata Nailul.

Kendati demikian, dia sepakat bahwa otoritas dan Satgas Waspada Investasi (SWI) berhak melarang sejauh perdagangan itu bersifat ilegal, termasuk dilakukan oleh pedagang kripto yang tidak

terdaftar.

"Selama ini Bappebti sudah merilis mana saja pedagang kripto dan koin kripto yang terdaftar dan berizin resmi di Bappebti. Seharusnya itu sudah cukup jadi acuan untuk melakukan pengawasan dan mengendalikan keterlibatan bank," katanya.

Dia menambahkan bahwa OJK berhak dan berwenang mengatur dan melarang perbankan dalam ekosistem aset kripto, dalam hal penempatan dana bank ke dalam bentuk aset kripto.

Pasal-

nya, dana di bank adalah dana masyarakat.

"Mereka tidak boleh main-main menempatkan dana nasabahnya, terutama di aset yang punya fluktuasi tinggi," jelasnya.

Teguh K. Harmanda, Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) mengungkap pihak asosiasi menghargai pernyataan dari otoritas.

Namun, menurutnya, sejauh ini asosiasi telah berupaya untuk menempatkan perdagangan kripto sesuai aturan main dan melengkapi perlindungan hukum. Ia mengatakan, sudah semestinya industri ini terus dijaga agar tumbuh secara sehat.

"Contohnya pada industri aset kripto yang sudah menerapkan rekomendasi terhadap APU/PPT, adanya pelaporan yang diwajibkan oleh Bappebti setiap harinya, dan melaporkan jika menemukan transaksi mencurigakan. Sehingga kami yakin sekali, bahwa transaksi aset kripto yang berjalan saat ini sudah seirama dengan mitigasi resiko yang kita khawatirkan bersama pada industri keuangan secara luas," ujar Teguh.

Sementara itu, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengungkapkan adanya gesekan dengan OJK akan berdampak pada telatnya peluncuran bursa kripto. Pasalnya, fungsi lembaga keuangan, dalam hal ini bank nantinya akan

“

Fungsi lembaga keuangan, dalam hal ini bank, nantinya akan sebagai kustodian untuk perdagangan aset kripto. Kustodian ini paling penting posisinya.

sebagai kustodian untuk perdagangan aset kripto. Kustodian ini paling penting posisinya.

"Jadi saya tidak heran kenapa launching bursa kripto ini molor terus dari semester II/2021 lalu, rupanya ada deadlock antara Bappebti dan OJK dalam melaksanakan perdagangan aset kripto yang diakui negara, dalam hal ini bursa kripto," kata Ibrahim.

Dengan kendala itu akan membuat dampak lanjutan seperti kian sulitnya aset kripto diterima di masyarakat.

"Bahkan akan makin berjamuran aktivitas perdagangan kripto yang sulit dipantau keamanannya. Negara makin sulit untuk meregulasi aset kripto ini," ujarnya. ■

